

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

**Erni Suryandari Fathmaningrum & Jati Pramana
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk kantor, badan dan dinas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan aplikasi software *SPSS V.15*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sedangkan tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Kata kunci : pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini tumbuh secara pesat hal ini mencerminkan bahwa terdapat respon masyarakat yang sangat tinggi terhadap permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hal yang menjadi sorotan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu mengenai penerapan transparansi

pengelolaan keuangan di organisasi-organisasi yang berada di dalam suatu pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menjelaskan tentang konsep otonomi daerah, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang ini terdapat perubahan yaitu pada

perkembangan otonomi daerah di setiap provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat (Asroel, 2016).

Apabila akuntabilitas rendah berarti secara tidak langsung menjelaskan bahwa organisasi sektor publik tidak menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan baik. Tidak adanya transparansi publik meningkatkan kegiatan pidana yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang bahkan sampai tindak pidana korupsi.

Transparansi pada pelaporan keuangan mewajibkan lembaga atau organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak ada kesalahan material dan informasi yang bersifat bias kepada pihak eksternal (Umaroh, 2017). Apabila semakin baik dalam penyajian laporan keuangan organisasi pemerintah daerah maka akan memberikan dampak yang baik berupa terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah yang ada di Indonesia telah berusaha untuk melakukan budaya transparansi di daerahnya dengan cara membuat

akan memberikan dampak negatif bagi organisasi sektor publik sehingga dapat merugikan pihak eksternal dalam hal ini adalah masyarakat. Salah satu contoh yang akan timbul dari dampak negatif apabila tidak menerapkan transparansi pelaporan keuangan adalah memunculkan ketidakadilan dalam masyarakat, distorsi dalam alokasi sumber daya,

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai transparansi namun kebanyakan perda transparansi yang telah ada tidak memiliki adanya sanksi, sehingga dalam pelaksanaannya sulit dalam melakukan penegakan hukum (Wintari dan Suardana, 2018).

Untuk mewujudkan transparansi pelaporan keuangan dan tata kelola yang baik mengenai pelaporan keuangan salah satu hal yang terpenting adalah dengan adanya reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi keuangan yang benar dan relevan secara terbuka dan jujur, dan kemudian laporan keuangan tersebut dilaporkan secara tepat waktu serta

disusun sesuai aturan standar akuntansi pemerintahan.

Pada tahun 2018, pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan transparansi pelaporan keuangan dengan melakukan publikasi laporan keuangan di *website* Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) daerah masing-masing. Dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yang telah di laporkan kepada BPK. Namun, terdapat adanya kejanggalan atas perolehan opini WTP yang didapatkan oleh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang dimuat oleh <https://nasional.sindonews.com> menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami puluhan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan sebanyak 192 dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang dimuat oleh <https://www.republika.co.id> bahwa terdapat temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta atas SPI kabupaten dan kota diantaranya yaitu belum optimalnya pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan yang kurang memadai, kurang memadainya pelaporan pertanggungjawaban, belum memadainya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, monitoring dan evaluasi hibah berkelanjutan.

Selain itu berdasarkan informasi yang dimuat oleh <https://www.bernas.id> BPK yang menyoroti informasi Kartu Inventaris Barang (KIB) dari DPUP (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sleman yang tidak sesuai. Selain itu BPK menemukan terkait proses pemeliharaan kendaraan sehingga harus mengembalikan sejumlah anggaran hilang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut peneliti transparansi pelaporan keuangan sangat penting untuk diteliti, karena apabila pemerintah tidak melakukan transparansi pelaporan keuangan publik tidak akan bisa mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah daerah dan transparansi pelaporan keuangan ini dapat mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dkk., (2015), Umaroh, (2017) dan Wintari dan Suardana, (2018) dengan menggunakan variabel independen yaitu pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, waktu, populasi dan penambahan variabel akuntabilitas. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan populasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlunya penambahan variabel akuntabilitas atas dasar kasus atau fenomena yang terjadi disalah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori *stewardship* menjelaskan mengenai seorang *steward* akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama-sama dan apabila kepentingan seorang *steward* terdapat perbedaan maka *steward* akan mengajak bekerja secara bersama karena *steward* mementingkan kepentingan bersama dari pada mementingkan kepentingan pribadi (Davis *et al.*, 1997).

Teori Institusional

Teori institusional didasari pada pemikiran untuk bertahan hidup. Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan tindakan dan juga pengambilan keputusan didalam organisasi publik tersebut. Sofyani dan Akbar, 2013 mengatakan bahwa isomorfisme institusional lebih memaknai keberadaan organisasi yang dipengaruhi oleh tekanan

normatif yang terkadang muncul dari sumber eksternal seperti lingkungan, dan juga bisa muncul dari internal organisasi itu sendiri.

Teori Signaling

Teori *signaling* menjelaskan tentang pemberian *signal* oleh manajemen yang memiliki tujuan untuk mengurangi suatu asimetri informasi (Lo, 2012). Sehingga, ketika manajemen mengerti akan kondisi keuangan yang sebenarnya dari pada *stakeholder* maka manajemen dapat memberikan suatu *signal* dengan cara melakukan pencatatan akrual diskresioner.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian kepada seluruh aktifitas-aktifitas karyawan yang dimana dilakukan oleh seorang pimpinan secara rutin supaya kinerja dari organisasi tersebut bisa optimal. Sedangkan dalam pemerintahan, pengendalian internal dilakukan kepada kinerja pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia (2015),

Asroel (2016), Wintari dan Suardana (2018) dan Mashunri (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

H₁:Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal merupakan suatu tekanan yang berasal dari luar suatu entitas. Tekanan dari pihak eksternal bisa memengaruhi suatu organisasi/entitas untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Setyowati (2017) mengatakan tekanan dari pihak eksternal biasanya berupa peraturan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga-lembaga formal dan non-formal lainnya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yesnita (2016), Kasfauzi (2016), Umaroh (2017) dan Wintari dan Suardana, (2018) hasil menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

H₂: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Faktor Politik

Faktor politik adalah kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah aturan atau regulasi. Faktor politik memiliki peran dalam menekan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan atau aturan yang berguna dalam melaksanakan penerapan transparansi keuangan (Fardian, 2014).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umaroh (2017), Afriani (2018) dan Davici (2018) hasil menunjukkan bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

H₃: Faktor politik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap apa yang telah dilakukannya. Amelia (2015) mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban kepada publik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap publik terutama dalam hal penerapan transparansi laporan keuangan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia (2015), Asroel (2016) dan Hamdi (2017) hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

H₄: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu dukungan yang kuat dari organisasi atau lembaga pemerintah untuk menjalankan, melakukan dan mengimplementasikan suatu

kebijakan yang telah diputuskan secara bersama-sama sehingga tujuan atas diterapkannya kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

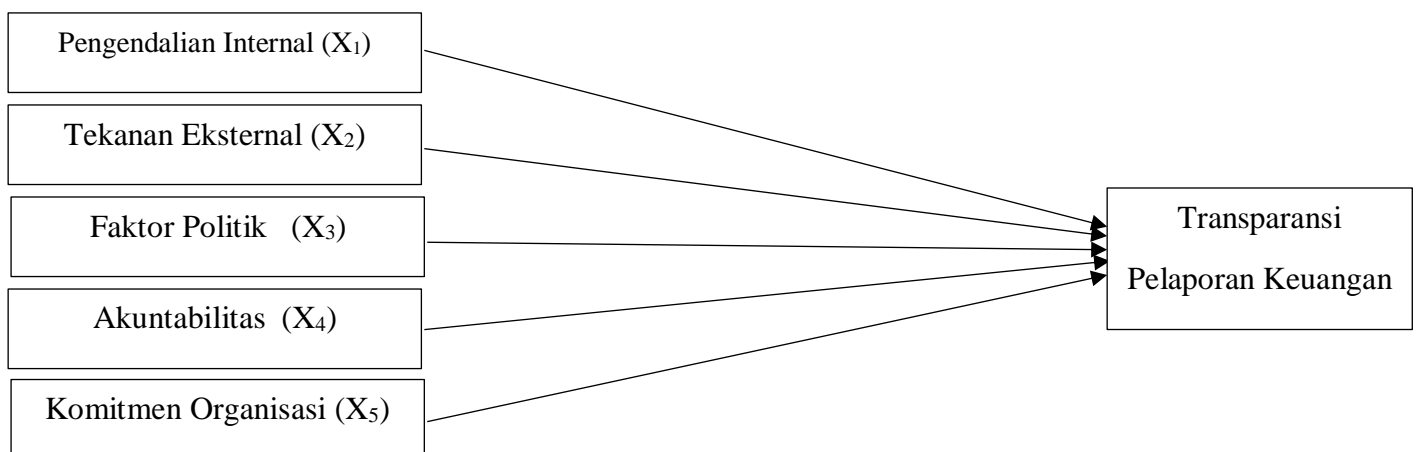
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dkk., (2015), Yunaz (2016) dan Wintari dan Suardana (2018) hasil

menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

H₅: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Model Penelitian

Model penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas dinas, badan dan kantor.

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data primer, data ini diperoleh dengan cara langsung dari sumbernya tanpa ada pihak perantara. Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner kemudian di dalam kuesioner ini berisikan pernyataan yang memiliki keterkaitan topik tentang pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang menjabat sebagai Kepala dinas, badan dan kantor, sekretaris dinas, badan dan kantor dan kepala bagian keuangan atau akuntansi. Serta minimal telah menjabat selama 1 (satu) tahun, dengan pandangan bahwa sebagai responden telah memahami atau mengerti situasi dan keadaan di dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta responden juga terlibat di dalam melakukan pelaporan.

adalah metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu yang dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organisasi Pemerintah Daerah yang berbentuk dinas, badan dan kantor

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden (Wintari dan Suardana, 2018). Kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil sampel Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang berbentuk kantor, badan dan dinas yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 3 kantor, 20 badan dan 102 dinas dengan peta distribusi yang terlihat dalam tabel 4.1 :

Tabel 1
Data Penyebaran Kuesioner

No.	Nama Kota / Kabupaten	Kuesioner Yang Dibagikan	Kuesioner Yang Kembali
1.	Kota Yogyakarta	78	73
2.	Kabupaten Sleman	78	75
3.	Kabupaten Bantul	66	65
4.	Kabupaten Gunung Kidul	75	72
5.	Kabupaten Kulon Progo	75	69
Total		372	354

Sumber : Data Primer

Kuesioner yang disebar sebanyak **372**. Gambar data sampel dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 2
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dikirim	372	100%
Kuesioner yang kembali	354	95%
Kuesioner yang tidak kembali	18	5%
Kuesioner yang dapat kembali dan diolah	314	85%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	40	3%

Sumber : Data Primer

Hasil Uji Statistik Deskriptif variabel penelitian pada tabel 3 adalah sebagai berikut

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Pengendalian Internal	5-25	15	7-25	20,28
Tekanan Eksternal	5-25	15	10-25	19,74
Faktor Politik	5-25	15	13-25	19,41
Akuntabilitas	4-20	12	10-20	16,43
Komitmen Organisasi	5-25	15	14-25	20,30
Transparansi Pelaporan Keuangan	5-25	15	13-25	20,94

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel di atas, variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi yang ada di

OPD Kabupaten dan Kota di DIY
tinggi.

Uji Validitas

Tabel 4
Uji Validitas

Variabel	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	Keterangan
Pengendalian Internal	0,774	Valid
Tekanan Eksternal	0,863	Valid
Faktor Politik	0,727	Valid
Akuntabilitas	0,813	Valid
Komitmen Organisasi	0,842	Valid
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,774	Valid

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas nilai *KMO* semua variabel di atas 0,5 maka seluruh butir pertanyaan semua variabel valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pengendalian Internal	0,872
Tekanan Eksternal	0,905
Faktor Politik	0,838
Akuntabilitas	0,856
Komitmen Organisasi	0,855
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,811

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel diatas 0,6 maka dapat

disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan keenam variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang cukup tinggi.

Uji Normalitas

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.129

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 6 uji *kolmogorov-smirnov* dengan nilai signifikansi sebesar $0,129 > \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengendalian Internal	.610	1.640
	Tekanan Eksternal	.583	1.715
	Faktor Politik	.446	2.244
	Akuntabilitas	.471	2.122
	Komitmen Organisasi	.517	1.935

Sumber : Output SPSS V.15

Berdasarkan tabel 4.13 uji multikolinearitas menjelaskan bahwa data yang ada pada masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini dapat

dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8
Uji Heteroskedastisitas

		Sig.
		Std. Error
1	(Constant)	.220
	Pengendalian Internal	.175
	Tekanan Eksternal	.053
	Faktor Politik	.098
	Akuntabilitas	.502
	Komitmen Organisasi	.087

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan variabel

lebih besar dari 0,05 maka, data yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji-F)

Tabel 9
Hasil Uji-F

Model		Sig.
1	Regression Residual Total	.000(a)

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi F 0,000 < α 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik,

akuntabilitas dan komitmen organisasi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Uji Koefisien Dterminasi (*Adjusted R²*)

Tabel 10
Hasil Uji *Adjusted R²*

Model	Adjusted R Square
1	.645

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,645. Hal ini berarti 64,5% variasi dari variabel transparansi pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen

yaitu pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi. Sisanya 35,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji *t*)

Tabel 11
Hasil Uji *t*

	B	Sig.
1 (Constant)	4.697	.000
Pengendalian Internal	.356	.000
Tekanan Eksternal	.027	.391
Faktor Politik	.106	.005
Akuntabilitas	.376	.000
Komitmen Organisasi	.215	.000

Sumber : Output *SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah

$$Y = 4,697 + 0,356 X1 + 0,27 X2 + 0,106 X3 + 0,376 X4 + 0,215 X5 + e.$$

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

Uji Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel di atas variabel pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $0,000 < \alpha$

0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,356. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

Uji Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel di atas variabel tekanan eksternal memiliki nilai signifikansi $0,391 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,027. Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Uji Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel di atas variabel faktor politik memiliki nilai signifikansi $0,005 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,106. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Uji Hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan tabel di atas variabel akuntabilitas memiliki nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,376. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima.

Uji Hipotesis 5 (H_5)

Berdasarkan tabel di atas variabel komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,215. Maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasar pengujian dan analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah :

1. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah.
2. Tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah.
3. Faktor politik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah.
4. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan

transparansi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah.

5. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi perangkat daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan antara lain :

1. Dalam penelitian ini dapat ditambahkan dengan menggunakan teknik wawancara supaya responden dapat memahami lebih dalam isi dari kuesioner yang diberikan oleh peneliti.
2. Dalam penelitian ini masih terdapat instrumen di dalam kuesioner yang kadang menimbulkan bias karena terkadang responden dalam menjawab instrumen pertanyaan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang tidak ada pernyataan negatif.

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel organisasi perangkat daerah yang berbentuk kantor, dinas, badan dan hanya dalam satu wilayah provinsi.

Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka, saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah :

1. Metode survey sebaiknya dilengkapi dengan teknik wawancara sehingga pengisian

kuesioner menjadi lebih objektif.

2. Disarankan untuk membuat item pernyataan negatif pada kuesioner yang akan digunakan.
3. Disarankan untuk menambahkan jumlah sampel yang digunakan, menggunakan wilayah yang lebih luas, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. 2018. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Faktor Politik Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 1, No. 1.
- Amelia, R. 2015. Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol 2. No. 2. 1-15
- Asroel, R. S. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3 No. 1. 867-880
- Belian, E.S dan Julita. 2015. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

- Dacin *et, al.* 2002. Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *The Academy of Management Journal*.
- Davici, N. 2018. Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Agam). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Fardian, D. 2014. Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas OPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Hamdi, F. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1. 3514-3528
- Kasfauzi, M. Ade. 2016. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3 No. 1.
- Davis, James H; Schooman, F. David; Donaldson, Lex;. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management*, 20-47.
- Dewi dkk. 2015. Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Karangasem). *Jurnal Akuntansi Program S1: Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1 No. 3.
- Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 3 No. 1.
- Lo, E. W. 2012. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan Terhadap Manajemen Laba: Teori Keagenan Versus Teori Signaling . *JRAK*, Vol. 8 No.1.
- Mashunri, Tryoandha. 2018. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 1 No. 1.
- Masrurroh, A. F. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4 No.7. 1-20
- Nazaruddin, Ietje; Basuki, Agus Tri;. 2019. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.

- Nugraha, D. 2011. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi). *Jurnal Sigma-Mu*, Vol. 3 No. 1.
- Purnamasari, R. W. 2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA Surabaya*, Vol. 4 No. 2. 1-17
- Paine, L. S. 1994. Managing Organizational Integrity. *Harvard Business Review*, March–April 1994.
- Ridha, M. Arsyadhi; Basuki, Hardo; 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Santoso, S. 2013. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 4.
- Setyowati, D. F. 2017. Pengaruh Tekanan Eksternal, Sumber Daya Manusia, Komitmen Manajemen, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Silver, D. 2015. Creating Transparency for Public Companies the Convergence of PR and IR in the Post-Sarbanes-Oxley Marketplace. *Public Relations Strategist: Winter*, Vol. 11 Issue 1,14.
- Sofyani, H., & Akbar, R. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 10 No. 2.
- Syarmenda, M. Arif. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 3 No. 1
- Umaroh, U. 2017. Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1
- Wintari, Komang Ayu dan Suardana. 2018. Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*

- Universitas Udayana*, Vol. 22. No. 1.
- Yesnita, Mutia. 2016. Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3 No. 1
- Yunaz, A. R. 2016. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 3 No. 1.
- Yuliani, N. L. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 1-14.
- Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 152
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
- DIY Delapan Kali Berturut-turut Pertahankan WTP <https://www.republika.co.id>. Diakses 23 Mei 2019 pk 21.47 WIB.
- KPK Dalam Puluhan Laporan Dugaan Korupsi di Yogyakarta <https://nasional.sindonews.com> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.31 WIB
- KPK Dalam Puluhan Laporan Dugaan Korupsi di Yogyakarta <https://news.okezone.com> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.33 WIB
- KPK Terima 192 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di DIY <https://news.detik.com> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.35 WIB
- KPK Telisik 192 Laporan Dugaan Korupsi di Jogja <https://www.jawapos.com> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.37 WIB
- KPK Ingatkan Sri Sultan HB X Ada 192 Laporan Korupsi di DIY <https://nasional.tempo.com> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.39 WIB
- Meski Raih WTP, Pemda DIY Terima Catatan dari BPK <http://jogja.tribunnews.com> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.40 WIB
- Pemerintah Kabupaten Sleman Kembali Meraih Predikat WTP <https://dprd.slemankab.go.id> Diakses 23 Mei 2019 pk 22.43 WIB
- BKAD Sleman Tindaklanjuti Temuan BPK Terkait BMD <https://www.bernas.id/63988-bkad-sleman-tindaklanjuti-temuan-bpk-terkait-bmd.html>

Diakses 10 Oktober 2019 pk
17.37 WIB

BPK RI Tetapkan DIY Kembali Raih
WTP <https://jogjaprov.go.id>
Diakses 23 Mei 2019 pk 22.45
WIB

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
<https://bkad.slemankab.go.id/>
Diakses 23 Mei 2019 pk 22.46
WIB

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul

<https://bkad.bantulkab.go.id/>
Diakses 23 Mei 2019 pk 22.47
WIB

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo
[https://bkad.kulonprogokab.go.i
d/](https://bkad.kulonprogokab.go.id/) Diakses 23 Mei 2019 pk 22.48
WIB

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunungkidul
<https://gunungkidulkab.go.id>
Diakses 23 Mei 2019 pk 22.49
WIB

SURAT PERSETUJUAN

Assalaamu 'alaikumwr. wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JATI PRAMANA
NIM : 2016 04 200 46
No. HP : 087 878 50 30 11 (nomor yang bisa dihubungi)
Email : jtipramana61@gmail.com
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tanggal yudisium: 3 DESEMBER 2019

Judul Skripsi :

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Dosen Pembimbing : ERNI SURYANDARI F.

Menyatakan bahwa,

1. Bersedia/~~tidak bersedia~~* bekerjasama dengan dosen pembimbing untuk mengembangkan skripsi menjadi naskah publikasi yang layak untuk diterbitkan di jurnal/prosiding yang dituju
2. Bersedia/~~tidak bersedia~~* menjadikan dosen pembimbing sebagai penulis pertama dalam naskah publikasi yang telah diolah dan diformat ulang sesuai ketentuan jurnal/prosiding yang dituju

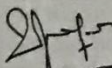
Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Wassalaamu 'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 18 November 2019

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,


(ERNI SURYANDARI F.)
NIK. 19700322199409143040


(JATI PRAMANA)

Mengetahui,

Kaprodi. Akuntansi



M. G. SAS, AK, CA
NIK. 11.2.61.99.603.143.053

*coret yang tidak perlu

